

1. Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indoensia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Utama, 1996
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1982
- Ghansham Anand, *Asas Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2013
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007)
- Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

- Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Prespektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi MECentre Group, 2014
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015
- Muhammad Rustamaji, *Pilar-Pilar Hukum Progresif Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta: Thafa Media,
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Satjipto Raharjo *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publsihing, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 1996
- Syamsul Arifin, Mardiah Ainun Soleh & Syaefurrahman Al Banjary “ *IPPAT Rumah Nyaman PPAT*” Jakarta: Warta Mandiri Multi Media, 2018
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1994),
- Supriadi dalam Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group
- Tan Thong Kie, *Buku II Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Icthiar Baru Van Hoeve, 2000

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015

Teguh Prasetyo & Adi Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung; Nusa Media, 2014

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkattullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2012

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2012

Perundang – undangan :

Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok

Agrarian

UU No. 16 tahun 2019 Perubahan UU No I Tahun 1974 tentang

Perkawinan

Undang – undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas

Tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang

arbitrase

Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang

Yayasan,

Undang- Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 Tentang

perubahan atas Undang- Undang nomor 2 tahun 2008 tentang

partai politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil

Notaris Sementara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 nomor 700

Perpres No. 13 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Permenkumham nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan

Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016 Peraturan Pemerintah Tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah nomor. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerapan Tanda

Tangan Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/2016 Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang layanan informasi

pertanahan secara elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang Pelayanan Hak

Tanggung Terintegrasi Secara Elektronik, yang ditetapkan tanggal 27 Mei 2019

memudahkan negara dalam hal ini Kementerian ATR untuk mengatur pendaftaran

Hak Tanggungan secara Elektronik.

Perkaban nomor 8 tahun 2012 perubahan atas Peraturan Menteri Negara

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang

ketentuan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/Janji Jabatan
Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1949 Nomor
665, tambahan negara Republik Indonesia tahun 1949 nomor 665

3. Lampiran

Materi Seminar H.R Benny Riyanto, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Omnibus Law Sebagai Solusi Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Peran Notaris dalam Mendukung Reformasi Regulasi*, dalam acara Diskusi Umum Omnibus Law Sebagai Solusi / Penyelesaian Tumpang Tindih Permasalahan Hukum Indonesia, diselenggarakan oleh YKCHI bekerjasama dengan Yayasan Phakar, Jakarta, 18 Januari 2020.

Materi Seminar Basuki Rekso Wibowo, *Omnibus law sebagai kebijakan politik dan hukum*, dalam acara Diskusi Umum Omnibus Law Sebagai Solusi / Penyelesaian Tumpang Tindih Permasalahan Hukum Indonesia, diselenggarakan oleh YKCHI bekerjasama dengan Yayasan Phakar, Jakarta, 18 Januari 2020.

Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, [_arenahukum.ub.ac.id > index.php > arena > article >](http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article), diakses pada tanggal 21 Januari 2020 Pukul. 05.54

¹<https://andrazain.wordpress.com/2013/05/31/manusia-dan-keadilan>, diakses pada 5 Desember 2016

<http://repo.unsrat.ac.id/382/1/pengalihanhakmilikatasbendamelaluiperjanjianjualbelimenurutkuhperdata.pdf>, diakses pada 6 Desember 2018

<https://www.atrbpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Keputusan-Menteri-ATR-Kepala-BPN/keputusan-menteri-agraria-dan-tata-ruangkepala-badan-pertanahan-nasional-republik-indonesia-nomor-112kep-41iv2017-67979>, diakses pada 6 Desember 2018

http://www.academia.edu/28902931/urgensi_perjanjian_dalam_hubungan_keperdataan, diakses pada 7 Desember 2018

<https://kbbi.web.id/profesi>

Pernyataan AM. Saefuddin et.al, dikutip dari Bahrum [journal.uin-alauddin.ac.id /index.php/sls/article/download/.../1243](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/.../1243)

Pernyataan Jujun S. Suriasumantri, dikutip dari Bahrum [journal.uin-alauddin.ac.id /index.php/sls/article/download/.../1243](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/download/.../1243)

<https://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/mph-3.pdf>

Pieter Latumeten,

http://medianotaris.com/teknik_pembuatan_akta_ppat_versi_perkaban_berita338.html

Retna Gumanti, ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840

Cahyanar Citratri Andika,

http://cahyaniar-c-a-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-45330-SOH201-CRITICAL%20THEORY%20REVIEW.html

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-onl.html>

Retna Gumanti, syarat sahnya perjanjian
[ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840,](http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/900/840) diakses tanggal 9 Agustus
2019

Maman Djafar, Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Dalam Praktek Di Pengadilan,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/10077/9663>